

SKRIPSI

**PENERAPAN AUDIT INTERN UNTUK MENUNJANG
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA PROYEK
PEMBANGUNAN DAERAH PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG**

**IRMAYANA
10573 0514214**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN AUDIT INTERN UNTUK MENUNJANG
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA PROYEK
PEMBANGUNAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN ENREKANG**

**IRMAYANA
10573 05142 14**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan
Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penerapan audit internal untuk menunjang efektifitas pengelolaan dana proyek pembangunan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa: Irmayana

No. Stambuk/ NIM: 10573 05142 14

Program Studi : Akuntansi

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi: Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah mengikuti ujian skripsi pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 bertempat diruangan 8.1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Ikram Idrus, M.Si
NIDN : 787256

Pembimbing II,

Andi Arman, SE., M.Si, Ak. CA
NIDN : 0906126701

Mengetahui,

Dekan,

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Ketua Program Studi,

Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK.CA
NBM : 107 3428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **IRMAYANA**, NIM : **105730514214**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0198/2018 M, Tanggal 18 Shafar 1440 H/ 27 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Shafar 1440 H
27 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, SE., MM, Ak. CA, CPA 
2. Abd Salam HB, SE., M.Si. Ak. CA, CSP 
3. Dr. H. Muhammad Rusydi, M.Si 
4. Asriati, S., MM 

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irmayana
Stambuk : 105730514214
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : Penerapan Audit Internal Untuk Menunjang Efektifitas
Pengelolaan Dana Proyek Pembangunan Daerah Pada
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji pada tanggal 27 Oktober 2018
adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh
siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 18 Shafar 1440H
27 Oktober 2018 M



Irmayana

Diketahui Oleh:

Dekan

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078

Ketua Program Studi,

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan dan kesabaran kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul Penerapan Audit Intern Untuk Menunjang Efektifitas Pengelolaan Dana Proyek Pembangunan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang , peneliti selesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga seantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan ajaran Allah SAW

Adapun tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar S1 pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain itu, skripsi ini dibuat untuk menambah wawasan kita mengenai cara pembuatan skripsi itu sendiri dan untuk memberikan informasi mengenai penerapan audit intern untuk menunjang efektifitas pengelolaan Dana Proyek Pembangunan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari orang tua serta keluarga yang memberikan semangat dan motivasi yang tinggi kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan, semangat serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.H. Abd Rahman Rahim, SE.,M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail rasulong SE.,M.M Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya
3. Ismail badollahi, SE.,M.Si,AK sebagai Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
4. Dr. Muhammad Ikram Idrus.,M.Si selaku dosen pembimbing 1 dalam pembuatan skripsi ini. Berkat bimbingan dan arahnya selama proses pembuatan skripsi ini, penulis mampu menyelesaikan penuisan skripsi ini.
5. Andi Arman,SE.,M.Si.,Ak.CA selaku dosen pembimbing 2 dalam pembuatan skripsi ini. Berkat bimbingan dan arahnya selama proses pembuatan skripsi ini, penulis mampu menyelesaikan penuisan skripsi ini.
6. Bapak / Ibu dan asisten dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Segenap staf dan karyawan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang yang turut membantu penulis selama melakukan penelitian.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Study Akuntansi Angkatan 2014 yag selalu membantu dan terus bekerja sama selama menjalangkan perkuliahan.
10. Terimakasih untuk semua kerabat yang tidak dapat saya tuliskan namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, motifasi dan dorongannya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Namun penulis menyadari bahwa setiap orang pasti memiliki kekurangan oeh karena itu, penulis berharap saran dan kritiknya demi kesempuraan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan tambahan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi pembaca utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 6September2018

Penulis

IRMAYANA

ABSTRAK

IRMAYANA, Tahun 2018. Penerapan Audit Intern Untuk Menunjang Efektifitas Pengelolaan Dana Proyek Pembangunan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh Pembimbing I Muhammad Ikram Idrus dan Pembimbing II Andi Arman.

Penelitian dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif, metode ini menjelaskan tentang peranan audit intern dalam menunjang efektifitas pengelolaan dana proyek pembangunan daerah pada dinas pekerjaan umum kabupaten enrekang.

Datanya berupa kegiatan dan program, laporan keuangan, realisasi anggaran, dan data yang di peroleh dala bentuk tulisan yang berupa gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa audit intern dalam Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang dapat menunjang efektifitas pengelolaan dana proyek pembangunannya.

Kata Kunci : Audit Intern, Efektifitas, pengelolaan dana proyek

ABSTRACT

IRMAYANA, in 2018. Implementation of internal audit to support the effectiveness of managing regional development project funds in the enrekang district public works department. Dibimbing oleh Muhammad ikram idrus dan andi arman

The study was conducted with a descriptive qualitative analysis method, this method describes the role of internal audit to support the effectiveness of regional development project management funds in the enrekang district public works department.

The data is in the form of activities reports, budget realization, and data obtained in writing in the form of general overview of the enrekang district public works service.

The results of the study concluded that the internal audit in the enrekang district public works department could support the effectiveness of the management of the development project funds.

Keywords: internal audit, effectiveness, project fund management

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSEMBAHAN/ MOTTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGATAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Audit Intern.....	6
B. Pengertian Efektivitas.....	14
C. Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (PIKD).....	17
D. Pengelola Keuangan Daerah	19
E. Pengertian dan Karakteristik Proyek	21
F. Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.....	22
G. Penelitian Terdahulu	24
H. Kerangka Fikir.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
B. Metode Pengumpulan Data.....	29
C. Jenis dan Sumber Data.....	29
D. Metode Analisis.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum objek penelitian	31
1. Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang	31
2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum.....	32
3. Tugas Pokok dan Rincian Tugas dari Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang	35
4. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum	42
B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian	44

1. Audit Intern Atas Pengelolaan Dana Proyek Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.....	44
2. Audit Intern Terhadap SKPD Dinas Pekerjaan Umum	46
3. Analisis Penyajian Pengelolaan Dana Realisasi Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum	49
4. AnalisisEfektifitas Dana proyek.....	52
5. Pengelolandanaprojekdinaspekerjaanumum	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA.....	74
----------------------------	-----------

LAMPIRAN LAMPIRAN	75
--------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 4.1	Rincian Anggaran dan Realisasinya tahun 2017	49
Tabel 4.2	Anggaran Belanja dan Realisasi tahun 2017	50
Tabel 4.3	Dana Proyek Pembangunan Fisik	56
Tabel 4.4	Dana Proyek Pembangunan Non Fisik	62

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	lampiran-lampiran	77

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan tersebut, membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Pemerintah pusat memberikan hak kepada pemerintah daerah, agar dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Maka pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk mendayagunakan potensi daerahnya masing-masing demi memajukan daerah tersebut.

Pemerintah daerah dituntut untuk mencapai alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Diharapkan dapat memberikan keleluasan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif

masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan tersebut yaitu :

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia,
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat,
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (partisipasi) dalam proses pembangunan.

Usaha mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, maka pemerintah mengarahkan khususnya pada bidang ekonomi, dimana pemerintah memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan di daerah yang dilaksanakan melalui langkah-langkah dan kebijaksanaan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan yang diharapkan.

Mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, di samping diperlakukan sistem perencanaan yang baik dan mampu mengantisipasi efektifitas pelaksanaan rencana, juga diperlukan sistem pelaksanaan dan pengawasan yang mantap dan mampu menjamin efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan.

Setiap alokasi dana yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkatan pelayanan atau hasil yang dapat diukur melalui kinerja sehingga diharapkan dapat meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih berhasil dan berguna sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Peranan audit intern dalam menunjang pengelolaan dana proyek pembangunan daerah akan menjadi suatu hal yang sangat penting, karena dapat menunjang efektifitas pengelolaan dana proyek pembangunan daerah itu sendiri. Selanjutnya masalah efisiensi dan efektifitas dalam mengelola dana proyek pembangunan itu sangat menentukan laju suatu daerah, tidak terkecuali di daerah Kabupaten Enrekang. Dengan demikian, pengelolaan dana tersebut harus dapat di pertanggung jawabkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Kegiatan yang dilaksanakan dengan modalitas nasional (National Implementation Modality/NIM) baik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau non pemerintah , audit dilaksanakan untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan (audit) merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen sehingga hasil audit dapat dipercaya objektivitasnya.

Audit intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efektifitas dan efisiensi prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi (Mulyadi, 2008:29)

Audit intern hendaknya terus-menerus meninjau dan melaksanakan tindak lanjut audit untuk memastikan apakah tindakan perbaikan untuk

mengatasi kelemahan-kelemahaan yang ditemukan dalam audit sudah dilaksanakan oleh manajemen, audit intern hendaknya memahami dan mengerti kegiatan audit dalam hal mengevaluasi penerapan audit intern, sehingga kegiatan audit dapat dimaksimalkan, dan kecurangan dapat dihindari , serta kinerja auditor intern hendaknya terus ditingkatkan agar dapat mengetahui dan menghindari terjadinya kecurangan.

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis tertarik membahas masalah dengan judul :”Penerapan Audit Internal Untuk Menunjang Efektifitas Pengelolaan Dana Proyek Pembanguana Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan audit internal atas pengelolaan dana proyek pembangunan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana peranan audit internal untuk menunjang efektivitas pengelolaan dana proyek pembangunan daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai penerapan dan peranan audit internal dalam menunjang efektifitas pengelolaan dana proyek pembangunan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian , diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru yang dapat menambah wawasan pembaca mengenai peranan audit internal dalam mengelola dana proyek pembangunan daerah pada Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Enrekang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan atau pertimbangan bagi penelitian lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di bidang audit intern.
3. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Audit intern

1. Pengertian Audit

Audit merupakan suatu tindakan yang membandingkan antara fakta atau keadaan yang sebenarnya (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya ada (kriteria). Atau melakukan tindakan evaluasi terhadap suatu organisasi ,sistem, atau produk sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pada dasarnya audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan menilai atau melihat apakah yang ada telah sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Elder, Mark S. Beasley, Alvin A.Arens dalam buku Amir Abadi Yusuf (2011:12), mendefinisikan auditing adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Audit merupakan kegiatan pengumpulan dan mengevaluasian bukti-bukti secara objektif yang dilakukan oleh orang independen dan kompeten dengan tujuan untuk mendapatkan kesesuaian informasi yang ada dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta memberi pendapat yang independen mengenai kewajaran atas laporan keuangan dan kemudian hasil-hasilnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan .

2. Pengertian Audit Intern

Audit intern merupakan kegiatan penilaian bebas , dipersiapkan dalam organisasi sebagai suatu jasa organisasi. Kegiatan audit intern memeriksa

dan menilai efektivitas dan kecukupan dari sistem pengendalian intern yang ada dalam organisasi, dengan tujuan untuk membantu semua anggota manajemen dalam memngelola secara efektif pertanggungjawaban dengan cara menyediakan analisis, penilaian, evaluasi, komentar-komentar, rekomendasi dan konsultan yang berhubungan dengan kegiatan yang telah dianalisis.

Defenisi internal audit menurut American Accounting Association dalam Sawyer, et al. (1996:8). adalah suatu proses yang sistematis secara objektif untuk memperoleh dan mengevaluasi asersi tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi. Penilaian tersebut dilakukan untuk meyakinkan derajat kesesuaian antara asersi dengan kinerja yang ditetapkan dan mengkomunikasikannya ke pihak yang berkepentingan. Board Director The Institute of Internal Auditor pada tahun 1999 melakukan redefinisi terhadap internal auditing, yang dikutip oleh Akmal (2006) menjelaskan bahwa internal auditing adalah suatu aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang aktivitas konsultan (consuling activity) yang bernilai tambah (value added) dan meningkatkan operasi perusahaan. Dengan demikian internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan cara pendekatan yang terarah dan sistematis untuk menilai dan mengevaluasi keefektifan manajemen resiko melalui pengendalian dan proses tata kelola yang baik.

Intern auditing is an independen appraisal function established within an organization to examine and evaluate it's activities as service to organization (Audit intern adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi), (Effendi, 2006:1).

Menurut Lawrence B. Sawyer (2005:10) Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah :

- a. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan,
- b. Resiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan minimalisasikan,
- c. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti,
- d. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi,
- e. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomi,
- f. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif, semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Istilah audit intern terdiri dari dua kata yaitu internal (intern) dan auditing (audit). Bila diartikan secara sederhana adalah suatu audit yang dilakukan oleh pihak intern dalam arti oleh perusahaan dengan menggunakan pegawai perusahaan itu sendiri (Sucipto,2007:2).

Menurut Ralona (2006:23) dalam kamus istilah ekonomi populer , audit intern (internal audit) adalah audit yang dilakukan oleh auditor internal untuk memastikan tidak terjadi manipulasi, tugas serta tanggung jawab pengurus dan komisariat telah dilaksanakan dengan baik. Internal Auditing adalah kegiatan staf yang dimaksud untuk menjamin keakuratan informasi sesuai dengan aturan ,kesalahan yang minimum terhadap pelaporan aset , dan

menjamin pelaksanaan tugas secara efisien dan efektif (Abdul Halim dan Tjahjono,2009).

Defenisi audit intern berikut ini, diciptakan untuk menggambarkan lingkup audit modern yang luas dan tidak terbatas eksternal (Lawrence Sawyer et,2005:10). Audit intern adalah sebuah penelitian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor intern terhadap operasi dan control yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah :

- a. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan,
- b. Resiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi,
- c. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti,
- d. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi,
- e. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomi,
- f. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggungjawab secara efektif.

Pengertian audit intern diatas tidak hanya mencangkup peranan dan tujuan auditor intern, tetapi juga mengakomodasi kesempatan dan tanggungjawab. Dalam perkembangan terakhir seseorang yang melakukan peran sebagaimana seorang auditor intern, tidak selalu menggunakan sebutan intern auditor saja , namum telah meluas menjadi kontrol atau system analisis.

3. Fungsi dan Kedudukan Auditor

Fungsi pemeriksaan intern hendaknya ditetapkan secara tertulis dan dirumuskan secara jelas. Uraian mengenai fungsi pemeriksaan intern harus

secara formal di tetapkan oleh pimpinan. Idealnya yang menetapkan adalah pimpinan tertinggi organisasi atau setidaknya tindakan pejabat tinggi yang cukup berwenang. Selanjutnya, pernyataan mengenai fungsi pemeriksaan intern tersebut perlu diinformasikan keseluruh jajaran pimpinan.

Kebanyakan orang menganggap bahwa konsep mengenai audit internal sama dengan audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik. Perbedaannya hanyalah bahwa pelaksannya adalah pegawai itu sendiri.

Jangkauan audit internal lebih luas dari sekedar verifikasi terhadap bukti besar dan catatan-catatan yang berkaitan dengan yang lainnya. Selain itu juga lebih besar dari sekedar menilai kualitas pencapaian berbagai orang dalam organisasi dalam melaksanakan tanggungjawab yang dibebankan kepada mereka. Internal auditor tidak harus membatasi diri hanya pencapaian nilai untuk menemukan kesalahan pekerjaan dalam dokumen akuntansi, akan tetapi juga harus melaksanakan sesuatu atas berbagai fungsi operasional atas nama puncak pimpinan.

Audit menyediakan jasa-jasa mencakup pemeriksa dan penilaian atas kontrol , kinerja, resiko, dan tata kelola (governance) perusahaan publik maupun maupun privet /pemerintah . Aspek keuangan hanyalah salah satu aspek saja dalam lingkup pekerjaan audit internal. Fungsi audit intern adalah :

- a. Menentukan baik tidaknya internal auditor dengan memperhatikan pemisah, fungsi dan apakah prinsip akuntansi benar-benar dilaksanakan,
- b. Bertanggungjawab dan menentukan apakah pelaksanaan menaati peraturan, rencana dan prosedur yang telah ditentukan sampai menilai apakah hal-hal tersebut perlu diperbaiki atau tidak,

- c. Memverifikasi adanya kebutuhan kekayaan termasuk mencegah dan menemukan penyelewangan,
- d. Memverifikasi dan menilai tingkat kepercayaan terhadap sistem akuntansi (accounting system) dan pelaporan,
- e. Menilai kehematan, efisien dan efektifitas kegiatan,
- f. Melaporkan secara objektif apakah yang diketahuinya kepada manajemen disertai rekomendasi perbaikan (Sucipto,2007:4)

Fungsi audit intern yang terperinci dan relatif lengkap menunjukkan bahwa aktifitas audit intern harus diterapkan secara menyeluruh terhadap seluruh aktifitas perusahaan atau pemerintah, sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas catatan-catatan akuntansi. Tujuan, kewenangan dan tanggungjawab divisi audit intern harus dinyatakan dalam dokumen tertulis yang formal, misalnya dalam anggaran organisasi. Anggaran organisasi harus menerangkan tentang tujuan divisi audit internal, menegaskan lingkup pekerjaan yang tidak dibatasi, dan menyatakan bahwa divisi audit internal tidak memiliki wewenang atau tanggung jawab dalam kegiatan yang mereka periksa.

Agar dapat menjalankan fungsi dengan baik, audit internal ini harus ditempatkan secara terpisah dari kegiatan operasional dengan alasan agar memiliki independen. Independen meningkatkan audit internal dalam memberikan pertimbangan yang objektif (unbiased) yang merupakan hal yang mendasar untuk melakukan audit yang memadai.

Kedudukan audit internal dalam suatu organisasi menempati posisi staf, hal ini berarti mereka tidak bertanggung jawab atas pencapaian berbagai aktifitas. Mereka hanya berkewajiban menilai dan melaporkan hal tersebut,

sehingga tidak memiliki wewenang untuk memerinta sesuatu kepada manajemen. Posisinya bersifat memberikan saran pada manajemen yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan suatu organisasi.

4. Tujuan Audit Intern

Tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota dalam organisasi dan dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Dalam hal ini audit internal memberi bantuan berupa analisis , penilaian , rekomendasi, konsultan, aktifitas perencanaan, serta memeriksa dan mengevaluasi informasi , kemudian mengkomunikasikan hasil aktifitas yang telah disertai tindak lanjut.

Secara umum audit internal adalah membantu semua oanggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif, dilengkapi dengan analisis-analisis yang berhubungan dengan setiap aktivitas usaha yang telah disetujui oleh audit internal dan mengevaluasi pengendalian dalam organisasi tersebut.

Tujuan pemeriksaan internal membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan melalui pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas keefektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik. Dilakukan dengan cara pengujian yang memberikan tingkat kendala terhadap kegiatan-kegiatan organisasi dan aktifitas pemberian konsultan kepada manajemen organisasi yang memerlukannya.

Pada dasarnya pemeriksaan internal diarahkan untuk membantu seluruh anggota pimpinan, agar mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam mencapai tujuan organisasi secara hemat, efiesien dan

efektif. Bantuan ini dilakukan oleh pemeriksaan internal dengan cara menyampaikan kepada para anggota pimpinan berbagai analisis, penilaian, kesimpulan dan rekomendasi mengenai kegiatan yang diperiksa dan konsultan yang dilakukan.

Audit internal tidak hanya bertanggung jawab sebatas penilaian yang dilaksanakan tetapi juga mendorong dilakukannya tindakan korektif dan memastikan manajemen mengetahui resiko apa yang diterima jika tindakan korektif tidak dilakukan, karena manajemenlah bertanggung jawab terhadap efektifitas pengendalian internal.

Pimpinan akan menerima laporan hasil dari compliance, verification dan evaluation kalau terjadi penyimpangan dari yang telah ditetapkan, pimpinan diberitahukan dan diberi penjelasan mengenai sebab-sebab terjadinya, juga memberi rekomendasi untuk jalan keluaranya.

5. Ruang Lingkup Audit Internal

Ruang lingkup audit adalah menilai keefektifitas sistem pengendalian internal serta mengevaluasi terhadap kelengkapan keefektifitas sistem pengendalian internal yang di miliki organisasi serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

Audit internal terlibat dalam memenuhi kebutuhan manajemen dan staf audit yang paling efektif melalui tujuan manajemen dan organisasi diatas rencana dan aktifitas perusahaan. Tujuan-tujuan audit disesuaikan dengan tujuan manajemen , sehingga auditor internal itu sendiri berada dalam posisi untuk menghasilkan nilai tertinggi pada hal-hal yang di anggap manajemen paling penting bagi kesuksesan organisasi.

Kontribusi auditor internal semakin penting seiring dengan makin berkembangnya dan makin kompleksnya sistem usaha. Tidak mungkin bagi eksekutif mengawasi semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi ada ajah hal-hal yang luput dari perhatiannya, kegiatan yang tidak diawasi akan kehilangan efisiensi dan efektifitasnya.

Agar tujuan dari internal audit dapat tercapai, maka kegiatan audit yang harus dijalankan pada dasarnya harus mencakup aktifitas penilaian terhadap pelaksanaan prosedur akuntansi, prosedur operasi, kebijakan-kebijakan , peraturan pemerintah yang berlaku dan penilaian terhadap pelaksanaan kerja pegawai, ketepatan rencana dan prosedur yang telah dibuat serta audit tentang kebenaran dan informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem akuntansi dengan tujuan laporan yang di buat dapat di percaya.

6. Kriteria Audit Intern

Audit internal merupakan bagian organisasi yang menjalankan fungsinya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen senior atau dewan direksi.

Agar tercipta pemeriksaan intern yang baik, maka perlu dipenuhi kriteria pelaksanaan audit internal yang memadai dan sesuai dengan kodifikasi yang berupa standar praktek profesional audit internal.

B. Pengertian Efektivitas

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umumnya menunjukkan pada taraf pencapaian hasil, seiring atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada

bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Istilah efektif (effective) dan efisien (efficient) merupakan dua istilah yang sering berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tentang arti dari efektif maupun efisien terdapat beberapa pendapat.

Efisiensi digunakan untuk mengukur, proses efektifitas guna mengukur keberhasilan proses, efisiensi guna mengukur keberhasilan mencapai tujuan. Khusus mengenai efektifitas pemerintah, Ndraha (2005) mengemukakan bahwa efektifitas (effectiveness) yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur, konsep hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai mana dalam proses dan siklus pemerintahan, hasil didefinisikan. Apakah pada titik output? outcome? Feedback? Siapa yang mendefinisikan: pemerintah, yang diperintah atau bersama-sama?.

Apapun penilaiannya, efektivitas birokrasi yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah.

Efektivitas menyangkut derajat keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi dapat dimaksud sebagai kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Menurut Sharma dalam Tangkilisan (2005), memberikan kriteria atau ukuran efektifitas organisasi yang

menyangkut faktor internal organisasi atau faktor eksternal organisasi antara lain:

1. Produktifitas organisasi atau output,
2. Efektifitas organisasi dalam bentuk keberhasilan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan didalam atau diluar organisasi,

Tidak ada ketegangan didalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Dalam hal ini, efisiensi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kemampuan untuk menghasilkan keluaran tertentu dengan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit dengan kemampuan menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk menghasilkan keluaran yang lebih besar.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai sasaran tersebut, dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut.

Sebuah kegiatan dikatakan efektif , apabila tujuan kegiatan itu akhirnya dapat dicapai. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan ketidak puasan, meskipun efektif kegiatan tersebut dapat dikatakan tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari dari kegiatan itu tidak mempunyai nilai tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu.

Menurut Fitrik (2005) efisiensi mempunyai pengertian tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya (aktual) sebandingan dengan kinerja yang ditargetkan yang biasanya diwujudkan dengan tujuan perusahaan. Efektifitas

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan atau pemerintah dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat, Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektifitas operasinya.

Efektifitas merupakan salah satu kinerja yang digunakan untuk menilai prestasi kerja dari suatu pusat pertanggung jawaban tertentu. Istilah efektifitas selalu dipakai dalam bentuk perbandingan dan tidak pernah digunakan untuk penilai yang mempunyai pengertian absolut.

Efektifitas dan efisien anggaran, hal perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik mungkin agar dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Secara umum, kelemahan yang menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja bukan pendekatan incremental yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh karena, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Berkenaan dengan itu maka penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya merupakan faktor penentuan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran.

C. Pengguna Informasi Keuangan Daerah (PIKD)

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih penting dalam pelaporan itu adalah kepuasan penggunaan

informasi. Banyak jenis penggunaan informasi untuk laporan keuangan dan penggunaan ini mempunyai bermacam kepentingan. Oleh karena itu , sangat sulit untuk menyiapkan informasi yang dapat memuaskan semua jenis pengguna.

Untuk memuaskan pengguna informasi, sangat perlu dilakukan upaya untuk mengali apa saja informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo bagi organisasi pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah :

1. Memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi , sosial, politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accuntability) dan pengelola (stewardship),
2. Memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manejerial dan orgasasion.

Secara rincian tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo, neraca dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah,
- b. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memperdiksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya,
- c. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undang , kontrak yang disepakati dan ketentuan lain yang diisyaratkan,
- d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penggaran serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi,

- e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. Publik mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah. Adanya tingkat kepuasan yang berbeda-beda untuk tiap pengguna informasi keuangan, menyebabkan kebutuhan informasi yang berbeda pula yang dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan.

Pengguna informasi yang difokuskan pada penelitian ini adalah seberapa besar kebutuhan informasi dari pihak-pihak luar manajemen internal pemerintah daerah terpengaruh oleh penyajian laporan keuangan daerah itu dan atas keterbukaan akses yang diberikan.

D. Pengelolaan Keuangan Daerah

Salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah adalah sistem atau cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntunan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini.

Pengelolaan dana (Funds Management) merupakan pengelolaan dana sendiri dan dana eksternal yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan dalam melakukan investasi (Rolana,2006:139).

Pengelolaan dana keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan , pelaksana, pantausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah,azas

umum dan struktur APBD , penyusunan rencana APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas , penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembina dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan / penyusunan anggaran pendapat belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dan rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dilihat dari aspek masyarakat (customer) dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatkan tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. Dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan daerah dimaksud untuk mewujudkan good governance. Dalam memberi layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah diuntut lebih responsif atau cepat dan tangkap. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan good governance yaitu (BPK,2006):

- a. Mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat,

- b. Memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian, dan
- c. Membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta merketisasi layanan.

Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektifitas pengelolaan dana pemerintah daerah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode (PP No.24 Tahun 2005).

Informasi-informasi yang disediakan oleh Laporan Realisasi Anggaran adalah mengenai informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan :

- a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat,
- b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan
- c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

E. Pengertian dan Karakteristik Proyek

Proyek adalah bentuk kegiatan yang dimulai pada waktu tertentu dan akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan dengan mengalokasikan sumber dayatertentuuntuk melaksanakan tugas dengan sasaran yang jelas. Beberapa contoh proyek adalah proyek kontruksi , pembangunan kembali gedung, pengembangan produk baru,penelitian dan pengembangan, pengembangan dan pemasangan siste informasi, rekturisasi keuangan, dan pekerjaan lainnya.

Suatu proyek dimulai ketika manajemen telah menyetujui hal-hal umum yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan dan telah mengotorisasi sejumlah sumber daya yang akan digunakan dalam prngejaran proyek tersebut. Proyek berakhir jika tujuannya telah tercapai, atau jika proyek tersebut dibatalkan. Pembangunan suatu gedung dan renovasi gedung merupakan suatu proyek ,tetapi pemeliharaan gedung tidak lagi merupakan proyek tetapi kegiatan operasi rutin. Dengan demikian suatu kegiatan yang tidak berakhir, seperti pemeliharaan gedung bukan merupakan suatu proyek.

Karakteristik proyek berikut ini dapat memberikan gambaran proses pengendalian suatu proyek dibandingkan dengan pengendalian manajemen rutin (Abdul Halim, Achmad Tjahjono, dan M.Fakhri Husein,2009:298-299).

Karakternya yaitu:

1. Memiliki tujuan khusus ,produk akhir atau hasil kerja akhir,
2. Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan telah ditentukan,
3. Bersifat sementara, dalam arti umumnya dibatasi oleh selesainya tugas , titik awal dan titik akhir ditentukan dengan jelas,
4. Nonrutin, tidak berulang-ulang ,jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung.

F. Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan kondinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrebang.

Evaluasi perencanaan pembangunan merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input) , keluaran(output) , hasil(result), manfaat (benefit), dan dampak (impact).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga , baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan pertanggungjawaban. Mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode,materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Pengendalian pelaksanaan yaitu :

1. Pimpinan Kementerian/ Lembaga / SKPD melalui pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing,
2. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing kementerian / lembaga/ SKPD
3. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut,
4. Menteri/ Kepala Badan Pendapatan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan

dari masing-masing pimpinan kementerian / satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewewenang.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian berikut ini, mengemukakan tentang hal-hal yang menyangkut audit internal. Sebut saja penelitian yang dilakukan oleh Vina Merliana (2017). Dengan menggunakan variabel deskriptif. Meneliti tentang pengaruh audit internal untuk mengeluarkan laporan audit terhadap penilaian integritas data penjualan pada perusahaan (studi kasus pada perusahaan PT Cipta Mulyadi Pratama, Jakarta). Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis deskriptif dari hasil kuesioner dengan jumlah sampel 75 orang responden menunjukkan bahwa :

- a. Audit internal, berdasarkan hasil dari sampel 75 orang responden menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap penjualan melainkan audit internal hanya bertujuan untuk melakukan pemeriksaan yaitu membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksannya.
- b. Laporan audit internal, laporan audit atas integritas data akan efektif bila terhadap pelaksanaan tindak lanjut agar proses audit yang berjalan benar-benar memberikan manfaat bagi perusahaan dan tindakan yang dilakukan seseorang harus konsisten dengan prinsip moral yang digunakan sebagai pegangan dalam membuat keputusan di tahap penalaran etis di dalamnya kesadaran moral berperan secara dominal ditentukan oleh kemampuan untuk dapat dipahami dengan kejujurannya. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis bahwa laporan audit internal atas integritas data dapat

berpengaruh terhadap penjualan karena dapat memberikan keputusan bagi penerima informasi.

Lina Farida Arief dan Iwan Setya Putra (2016). Dengan menggunakan variabel Deskriptif Kuantitatif. meneliti tentang peranan audit internal untuk menunjang efektivitas pengendalian internal persediaan obat-obatan pada rumah sakit umum Aminah Blitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal persediaan obat-obatan pada rumah sakit umum Blitar. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berperan dalam mengurangi selisih stok plus minus pada data persediaan obat yang ada pada rumah sakit. Hal ini didapat dari laporan stok plus minus pada data persediaan obat yang ada pada rumah sakit. Hal ini didapat pada laporan stok opname periode 15, yang menunjukkan penurunan selisih yang cukup besar, yaitu dari bulan juni sebanyak 100 unit obat penurun pada bulan desember menjadi 86 unit obat. Rekomendasi yang diberikan adalah audit internal harus memantau secara langsung saat dilakukannya stok opname agar dapat diminimalisasi selisih data dari persediaan obat dari rumah sakit. Dan dengan menggunakan pengujian efektivitas pengendalian internal persediaan, audit internal berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal persediaan, audit internal berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal persediaan obat-obatan, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan kuesioner sebesar 78,90% yang berarti hasilnya dapat diterima.

Ety Meikhati dan Istiyawati Rahayu (2015). Dengan menggunakan variabel analisis Deskriptif. Meneliti tentang peranan audit internal dan

pengecehan fraud dalam menunjang efektivitas pengendalian internal (studi kasus pada yayasan internusa Surakarta). Dalam penelitian ini, rumusan masalah assosiatif yang digunakan adalah dalam bentuk adalah kausal yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi). Dalam penelitian yang menjadi variabel bebas adalah peranan audit internal (x_1) dan pengecehan fraud (x_2) dan yang menjadi variabel terikat adalah efektivitas pengendalian internal (Y).

Dena Eka Agustina dan Rizal Zaelani (2017). Dengan menggunakan variabel Deskriptif Asosiatif. Meneliti tentang pengaruh pemeriksaan internal (audit internal) terhadap efektivitas pengendalian internal. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan internal (audit intern) berpengaruh secara positif signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pemeriksaan internal dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap pengendalian internal, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini seperti audit internal, manajemen resiko, dan variabel lain.

Tomi Nugroho (2012). Dengan menggunakan variabel Kualitatif. Meneliti tentang analisis sistem pengendalian intern pemerintah pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (studi kasus proyek peningkatan jalan dan jembatan kota Administrasi Jakarta Utara). Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara telah mengacu dan memperhatikan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah. Kegiatan

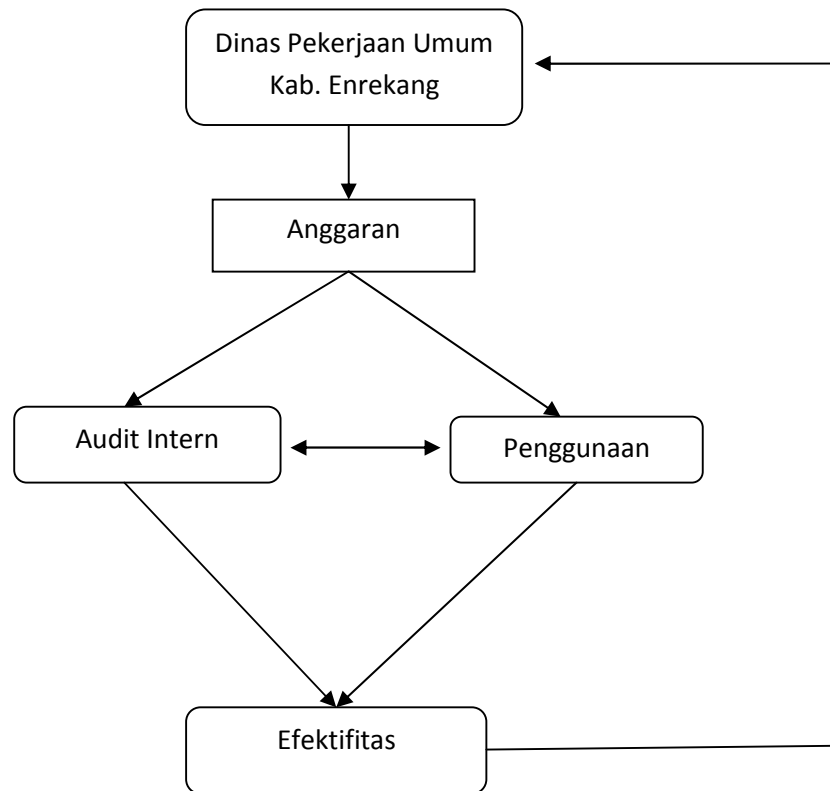
ini juga telah dijalankan sesuai dengan Peraturan Presdir No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari proses pengadaan barang/jasa diadakan dengan pelelangan terbatas prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem gugur dan evaluasi sistem penilaian untuk menentukan konsultan pengawasan sedangkan untuk penyedia barang dan jasa pelaksanaan fisik pekerja menggunakan pelelangan umum pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur.

H. Kerangka Konsep

Dalam hal ini penyusunan APBD pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang., dibutuhkan penanganan dan mekanisme yang baik dan benar yang secara keseluruhan ,pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan dan kebijaksanaan oleh instansi tersebut.

Mekanisme dalam penyusunan APBD pada Pemerintah Kabupaten Enrekang., melalui beberapa tahapan yang disusun berdasarkan rencana kegiatan yang didukung dengan data akurat yang meliputi seluruh rencana kegiatan dalam satu tahun anggaran berdasarkan kebutuhan nilai instansi/unit kerja tersebut.

Dari uraian tersebut, maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis mengambil objek penelitian di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang yang beralamat di Kabupaten Enrekang . Adapun waktu yang dimanfaatkan untuk melakukan penelitian dan pengumpulan sejumlah data adalah kurang lebih 2 bulan lamanya.

B. Metode Pengumpulan Data

Untuk perlengkapan penelitian ini, penulis memperoleh bahan dan data dengan cara penelitian lapangan (Field Research)

Yaitu penelitian data yang dilakukan dengan jalan mengadakan kunjungan pada objek lapangan yang diperlukan , digunakan teknik/metode sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab dilakukan dengan pimpinan instansi dan staf yang langsung menagani penyusunan dan penggunaan anggaran daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari instansi dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan
- b. Data Kuantitatif yaitu data yang di peroleh dari instansi dalam bentuk angka-angka .

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari instansi melalui wawancara dengan pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.,
- b. Data Sekunder yaitu data yang sudah diolah dan bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.yang diteliti, misalnya sejarah singkat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang., struktur organisasi, dan informasi yang berhubungan dengan pengelolaan dana proyek pembangunan Kabupaten Enrekang..

D. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu untuk menganalisis peranan audit intern dalam menunjang efektifitas pengelolaan dana proyek pembangunan daerah pada dinas pekerjaan umum Kabupaten Enrekang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum objek penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja, badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten enrekang. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan peraturan daerah Nomor 2 tahun 2004, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Kabupaten Enrekang yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati. Dinas pekerjaan umum Kabupaten Enrekang mempunyai fungsi dan tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah bidang pekerjaan umum yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati,
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,
- c. Merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan teknis dalam program pembangunan fisik Kabupaten Enrekang,
- d. Mengkoordinasikan perumusan serta memfasilitasi kebijakan pemerintah Kabupaten dalam bidang ke PU-an.

Sebagai instansi teknis, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang didalam menjalankan tugas pembangunan, pembinaan, dan pemeliharaan sektor ke PU-an, maka dituntut untuk dapat menyusun program dan rencana

statejik pembangunan yang menggambarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan Kabupaten guna pencapaian visi daerah. Didalam Dinas Pekerjaan Umum dalam menyingkapi visi daerah, masa issue stratejik yang dihadapi adalah bagaimana mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana ke PU-an yang berkualitas sehingga dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung perwujudan visi Kabupaten Enrekang.

2. **Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum**

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Sub bagian – sub bagian
- d. Bidang- bidang
- e. Seksi-seksi

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub bagian perencanaan umum
- b. Sub keuangan
- c. Sub bagian umum dan kepegawaian

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan masing-masing Sub bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub bagian

Bidang – bidang terdiri dari :

- a. Bidang Bina Marga
- b. Bidang PSDA
- c. Bidang Peralatan

- d. Bidang Bina Teknik/ Bina Program
- e. Bidang ketenagalistrikan dan penerangan jalan umum

Masing- masing bidang dipimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh seorang kepala bidang

Seksi- seksi bidang Bina Marga:

- a. Seksi pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan
- b. Seksi Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
- c. Seksi pengembangan jaringan jalan dan jembatan

Seksi- seksi bidang PSDA:

- a. Seksi pengembangan prasarana pengairan
- b. Seksi pengelolaan dan pengendalian wilayah sungai
- c. Seksi rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana pengairan

Seksi-seksi bidang peralatan:

- a. Seksi tata laksana peralatan dan perbengkelan
- b. Seksi perbengkelan
- c. Seksi pemeliharaan peralatan

Seksi- seksi bidang bina teknik/ bina program:

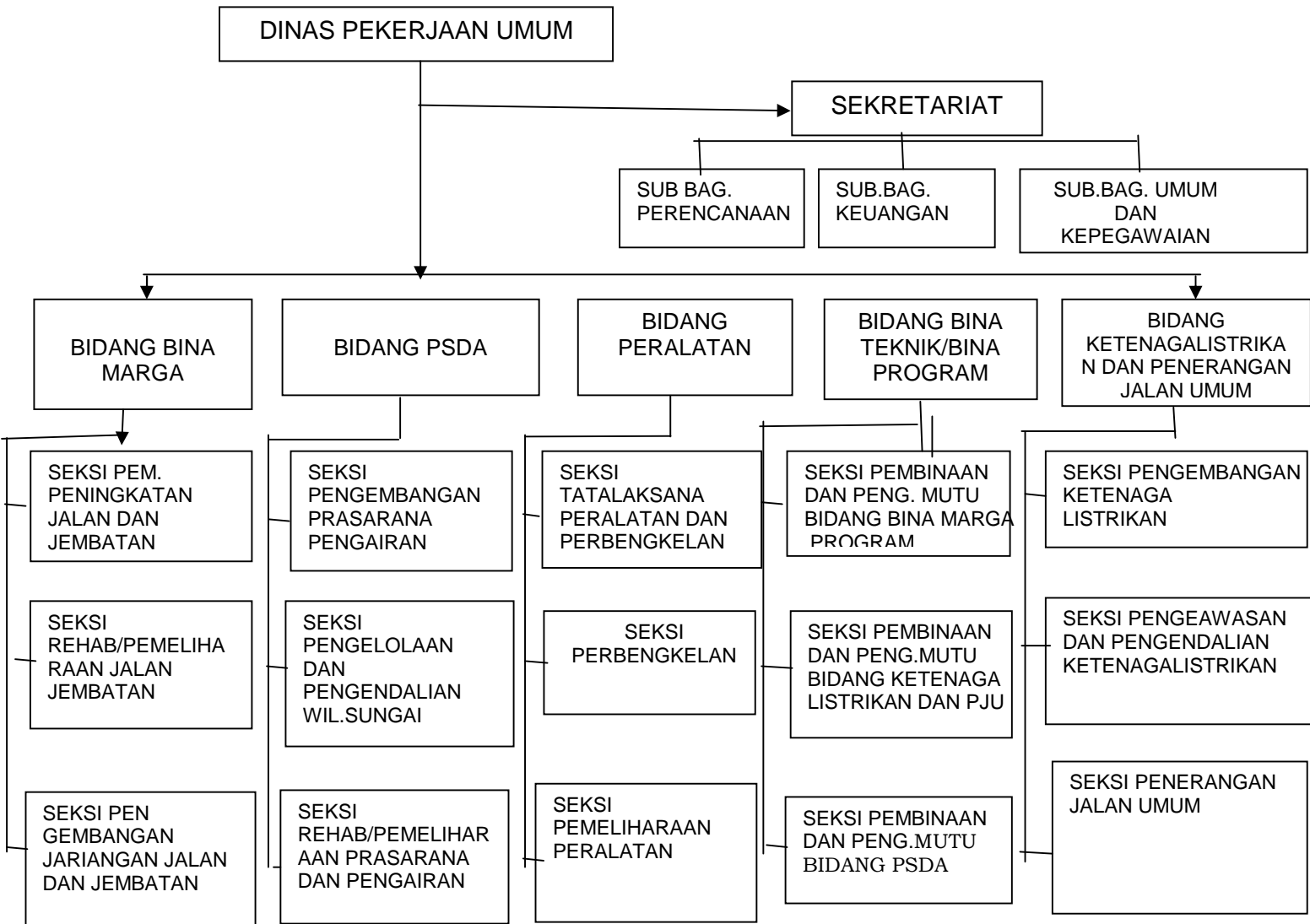
- a. Seksi pembinaan, pengawasan dan pengendalian mutu bidang bina marga
- b. Seksi pembinaan dan peng. Mutu bidang ketenagalistrikan dan pju mutu
- c. Seksi pembinaan, pengawasan dan pengendalian mutu bidang PSDA

Seksi- seksi bidang ketenagalistrikan dan penerapan jalan umum

- a. Seksi pengembangan ketenagalistrikan
- b. Seksi pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan
- c. Seksi penerangan jalan umu

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang



3. Tugas pokok dan Rincian Tugas dari Struktur Organisasi Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang

1. Kepala Dinas

- a. Tugas pokok seorang kepala Dinas yaitu merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Rincian Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu Merumuskan rencana strategik dan program kerja dinas yang sesuai dengan visi misi daerah; Membina dan mengembangkan karir pegawai serta pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupu dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

2. Sekretariat

- a. Tugas dari seorang sekertaris yaitu merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi bagian perencanaan umum, bagian umum dan kepegawaian serta bagian keuangan.

Sub Bagian perencanaan umum, Sub Bagian umum dan kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas yang sama yaitu merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan/tugas di masing-masing Sub Bagian.

b. Rincian Tugas Sekretaris yaitu Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang perencanaan umum, bidang umum dan kepegawaian, bagian pelaporan keuangan: Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan umum, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Rincian Tugasnya adalah Membuat laporan operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Mengendalikan surat masuk dan surat keluar; Menyelenggarakan administrasi kepegawaian; Mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai.
- 2) Sub Bagian Perencanaan umum, Rincian Tugasnya adalah Menyusun rencana perjalanan dinas; Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan; Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas; Membuat laporan hasil kegiatan.
- 3) Sub Bagian Keuangan, Rincian Tugasnya adalah Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; Melaksanakan pembendaharaan keuangan dinas, melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas; Mengevaluasi hasil program kerja.

3. Bidang Bina Marga

- a. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Bina Marga. Seksi Pembagunan jalan, peningkatan jalan dan jembatan, Seksi rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan, serta Seksi pengembangan jaringan jalan dan jembatan. dipimpin oleh seorang Kepala Seksi di bagiannya masing-masing dan mempunyai tugas yaitu merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas masing-masing Seksi.
- b. Rincian Tugas dari Kepala Bidang Bina Marga yaitu Merencanakan operasionalisasi dan menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; Menyusun rencana pelaksanaan dan verifikasi rencana desain pembangunan jalan dan jembatan; Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya.
 - a. Rincian Tugas Seksi Pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan : Menyusun program perencanaan pembangunan jalan; Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan; Melaksanakan verifikasi rencana desain pembangunan jalan dan jembatan.
 - b. Rincian Tugas Seksi rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan: Melaksanakan pendataan terhadap program pemeliharaan jalan dan jembatan : melaksanakan pembinaan

dan pengawasan terhadap pemeliharaan jalan dan jembatan :
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

- c. Rincian Tugas Seksi Pengembangan jaringan jalan dan jembatan :melaksana evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan dan pemantauan.

4. Bidang PSDA

- a. Bidang PSDA dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan sumber daya air
- b. Rincian Tugas Kepala PSDA,
 - 1) Rincian Tugas Seksi pengembangan prasarana pengairan; melaksanakan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelola sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayak program dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air.
 - 2) Rincian tugas seksi pengelolaan dan pengendalian wilayah sungai; melaksanakan pengelolaan dan pengendalian sumber daya air;
 - 3) Rincian tugas seksi rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana pengairan; pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan

pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan penangungan kerusakan akibat bencana;

5. Bidang peralatan

- a. Bidang Teknik dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan; melakukan pemeriksaan peralatan.
- b. Rincian Tugasnya, sebagai berikut :
 - 1) seksi tata laksana peralatan dan perbengkelan; melaksanakan urusan peralatan guna mendukung pelaksanaan kegiatan pekerjaan bidang peralatan; menyusun program rencana kebutuhan perawatan dan pengadaan peralatan;
 - 2) seksi perbengkelan; melakukan perawatan atau perbaikan;

6. Bidang Bina Teknik/ Bina Program

- a. Bidang Bina Teknik/ Bina Program dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan (rencana kerja anggaran-dokumen pelaksanaan) di bidang bina marga setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis dinas pekerjaan umum; melaksanakan koordinasi pemrograman teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem modal transportasi bersama instansi terkait.
- b. Tugas pokok Bidang Bina Teknik/ Bina Program; melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan

hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

- a. Seksi pembinaan, pengawasan dan pengendalian mutu bidang bina marga
- b. Seksi pembinan, pengawasan dan pengendalian mutu bidang cipta karya
- c. Seksi pembinan, pengawasan dan pengendalian mutu bidang PSDA

4. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum

- a. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa adalah "Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Enrekang".

- b. Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang

Untuk memenuhi visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang merencanakan misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan

baik. Agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, diharapkan seluruh aparat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah kotanya dan mengetahui fungsi-fungsi pokok serta program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang. Misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan terkondisinya jalan dan jembatan dalam kondisi baik, serta pemenuhan sarana dan prasarana bidang kebinamargaan untuk pengembangan wilayah, kelancaran transportasi barang/jasa dan manusia;
- b) Memenuhi kebutuhan infrastruktur sumber daya air dalam rangka mendukung sektor pertanian dalam arti luas;
- c) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dalam rangka pencapaian MDG's (Millenium Development Goals);
- d) Melaksanakan pembangunan dan memfasilitasi penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman, serta lingkungan;
- e) Melaksanakan pendataan, pembinaan, pengembangan usaha jasa konstruksi;
- f) Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam rangka pemanfaatan, pengendalian, tata ruang, dan kawasan strategis;
- g) Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana fisik fasilitas kota;

- h) Meningkatkan sumber daya manusia bidang ke-PU-an dengan didukung data dan informasi yang akurat.

B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian

1. Audit Intern Atas Pengelolaan Dana Proyek Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang

Dalam operasionalnya, pengelolaan dana proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang diperiksa oleh bagian audit intern, dimana audit internal bertugas sebagai pengawas dan penilai aktivitas keuangan instansi.

Keterlibatan audit intern dalam pengelolaan dana proyek, di mana fungsi audit intern berperan sebagai pemeriksa dokumen sebelum dokumen tersebut sampai kepada pimpinan untuk disetujui. Akan tetapi, lingkup tugas audit intern hanya sebatas memeriksa keabsahan dari dokumen dan berperan sebagai pengawas. Dan pada saat pemeriksaan atas temuan dana proyek tersebut, maka barulah audit intern melakukan tugas dan melaporkan temuan-temuannya kepada pimpinan dalam bentuk laporan audit intern.

Adapun beberapa tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh audit intern yaitu :

1. Persiapan Audit

Kegiatan yang dilakukan audit intern pada tahap persiapan meliputi penetapan penugasan, pemberitahuan audit, dan penelitian pendahuluan.

2. Penyusunan program audit

Audit intern membuat rencana langkah kerja yang harus dilakukan selama pemeriksaan dana yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta informasi yang ada tentang kegiatan dana proyek yang diperiksa.

3. Pelaksanaan penugasan audit

Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan penugasan audit yaitu pemeriksaan dana proyek, pemeriksaan pengelolaan dana proyek, penilaian pemberian keputusan dana proyek, penilaian realisasi dana proyek, dan penilaian kegiatan lainnya yang berhubungan dengan dana proyek.

4. Pelaporan hasil audit

Hasil atau temuan audit dikumpulkan dalam bentuk ikhtisar hasil audit dan didiskusikan terlebih dahulu dengan pimpinan instansi.

5. Tindak lanjut hasil audit

Audit intern melakukan pengecekan terhadap tindak lanjut pada Dinas Pekerjaan Umum untuk melihat sejauh mana hasil audit tersebut telah ditindak lanjuti, apakah perbaikan telah dengan tuntas dilakukan audit, masih dalam proses atau belum diselesaikan sama sekali.

2. Audit Intern Terhadap SKPD Dinas Pekerjaan Umum

1. Dasar Hukum Audit

Audit kinerja pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- b. Keputusan Presiden RI Nomor 103 2001, yang telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- c. Surat Kepala BPKP Nomor Kep-1299/K/SU/2006 tentang Renstra BPKP tahun 2006-2010 dan Renstra Deputi IV tahun 2006-2010.
- d. Surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ST-1611/PW21/3/2009 tanggal 28 Agustus 2009.

2. Tujuan dan Sasaran Audit

a. Tujuan Audit

Audit atas kinerja pelayanan pemerintah daerah bertujuan untuk menilai kinerja pelayanan dan menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta memberikan rekomendasi berupa langkah-langkah untuk memperbaiki permasalahan yang ditemukan.

b. Sasaran Audit

Untuk mencapai tujuan tersebut, Audit kinerja difokuskan pada :

1. Rencana capaian sasaran yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
2. Realisasi capaian sasaran yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja.
3. Kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan dalam APBD telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan telah efektif dalam mencapai sasaran.
4. Transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan pemerintah daerah.
5. Indeks kepuasan masyarakat.

3. Capaian Sasaran Dalam Sistem Pengendalian Intern

Hasil pengujian atas sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang belum mencapai target sepenuhnya. Hanya sebatas kegiatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum yang sudah memadai dan mencapai targetnya tetapi dalam instansi belum memiliki strategi pembinaan sumber daya manusia yang utuh, ukuran dan indikator kinerja belum ditetapkan untuk tingkat instansi dan pegawai. Pemantauan yang dilakukan pimpinan instansi dan evaluasi terpisah belum dilakukan untuk memastikan pengendalian intern berjalan sesuai dengan tujuan.

4. Audit Atas Keekonomian, Efisien, dan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Hasil audit atas keekonomisan, efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Keekonomisan

Hasil audit atas keekonomian menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa belum sepenuhnya menggunakan standar yang ditetapkan dalam perda dalam penyusunan DPA-SKPD.

b. Efisiensi

Penyusunan kegiatan yang tertuang dalam DPA-SKPD belum didasarkan pada standar analisis biaya sehingga penilaian atas efisiensi penggunaan belum dapat dilakukan.

c. Efektivitas

Hasil audit atas efektivitas kegiatan Dinas Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah efektif untuk mendukung sasaran.

d. Pelaporan Hasil Audit

Sebelum Laporan Hasil Audit (LHA) dibuat, hasil atau temuan audit dikumpulkan dalam bentuk ikhtisar hasil audit dan didiskusikan terlebih dahulu dengan kepala dinas dan kepala bidang. Kegiatan ini dinamakan *exit meeting* dimana pada pertemuan tersebut, tim audit mengkonfirmasi temuan audit yang telah diperoleh, mendengarkan tanggapan/komentar audit mengenai temuan audit dan juga menerima komitmen dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang mengenai waktu penyelesaian perbaikan atau tindak lanjut atas temuan tersebut.

Setelah *exit meeting*, salah seorang auditor internal ditunjuk untuk membuat konsep laporan yang kemudian direview oleh Inspektorat/Badan Pengawasan agar diperoleh keyakinan bahwa laporan tersebut telah lengkap dan benar dimana laporan tersebut telah memuat informasi mengenai temuan audit secara jelas mengenai fakta, keadaan yang seharusnya serta dampak dan penyebab terjadinya penyimpangan, tanggapan/komentar audit atas temuan audit berupa pembenaran/persetujuan, atau keberatan/penolakan, alasannya dan komitmen untuk melakukan perbaikan dengan batas waktu tertentu dan rekomendasi perbaikan dari auditor internal.

Setelah review atas konsep laporan, kemudian auditor internal membuat Laporan Hasil Audit (LHA) yang mencakup seluruh pemeriksaan tidak hanya pemeriksaan dibidang sekretariat melainkan semua pemeriksaan yang dilakukan baik dalam bidang Bina Marga, Bidang PSDA, Bidang Peralatan, Bidang Teknik/Bina Program serta

Bidang Ketenagalistrikan dan Penerapan Jalam Umum. LHA ditandatangani atau disetujui oleh Kepala Dinas.

3. Analisis Pengelolaan Dana Realisasi Anggaran Pada Dinas Ke PU-an

1. Analisis Realisasi Anggaran

Sumber dana untuk melaksanakan bersumber dari APBD tahun 2017 dan Dana lain/Dana DAK. Rincian jumlah anggaran dan realisasi dalam tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel 4.1

Tabel 4.1

Rincian Anggaran dan Realisasinya

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	APBD	309.616.114.516	

Tabel 4.2

Anggaran Belanja dan Realisasi

No	Jenis Belanja	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi Dana (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Persen(%)
1	Belanja Langsung	309.616.114.516	255.536.428.956	54.079.685.560	82,53
2	Belanja Pegawai	2.732.953.000	1.735.591.000	997.362.000	63,51
3	Belanja Barang dan Jasa	9.542.115.451	8.993.955.747	548.159.704	94,26
4	Belanja Modal dan Penunjang Modal	297.341.046.065	244.806.882.209	52.534.163.856	82,33

2. Analisis Pengelolaan Keuangan

a. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di kas umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah Daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di kas umum Daerah, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendaharawan Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat disahkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya dimaksud untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Asset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh

baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan, mutasi pos-pos asset kewajiban dan ekuitas dana di neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Pemerintah Daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- b. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos pos Neraca telah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi pemerintahan kecuali dalam hal penyajian asset tetap. Pada Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan penyusunan neraca awal Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. Seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh asset-asset Pemda.

Untuk pengadaan jenis asset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun 2016, (Tahun 2017) penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (At Cost).

4. Analisis Efektivitas Dana Proyek

Efektivitas berhubungan dengan hasil operasi/hasil kinerja sehingga untuk menilai efektivitas pengelolaan dana proyeknya, maka kita dapat menilai apakah dana proyek tersebut telah mencapai sasaran tertentu. Efektivitas pengelolaan dana proyek akan tercapai jika rata-rata kinerja kegiatan tahunan mendukung tercapainya beberapa kebijakan yang ada dalam Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.

Secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 untuk mendukung terlaksananya kebijakan telah dilaksanakan secara optimal. Dari 22 Program yang ditetapkan, 20 program mendapat skor lebih besar dari 85% kategori capaian "Sangat Baik", 1 program mendapat skor 66% kategori capaian "Cukup" dan 1 program mendapat skor 44,44% kurang dari 55% kategori capaian "Kurang".

Berdasarkan data diatas, peranan audit intern terhadap efektivitas pengelolaan dana proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang telah dilakukan secara efektif.

Dalam hal ini, audit internal selalu berupaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan dana proyek dan programnya agar dari tahun ke tahun akan semakin baik. Ini terlihat dari pemeriksaan kegiatan pengelolaan dana proyek yang dilakukan dengan memperhatikan potensi resiko yang ada dan juga melakukan pemeriksaan atas penyaluran dana proyek ke setiap bagiannya. Dilakukannya pemeriksaan terhadap kegiatan pengelolaan dana proyek secara berkelanjutan dengan melakukan pemeriksaan yang rinci terhadap proses analisis kelayakan, pemeriksaan atas otoritas pemberian keputusan, pemeriksaan terhadap kegiatan pengawas,

dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sekretariat, bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang tata ruang, bidang kebersihan, serta bidang teknik dan perencanaan juga telah membuktikan bahwa audit operasional memiliki peranan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan dana proyek yang berarti terjadinya peningkatan kinerja kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.

Diharapkan pemeriksaan kegiatan pengelolaan dana proyek yang berkelanjutan akan makin meningkatkan efektivitas pengelolaan dana proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.

5. Pengelolaan Dana Proyek Dinas Pekerjaan Umum

Pemerintah pusat berperan penting dalam proses transfer dana ke pemerintah daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 21 Tahun 2009, terdapat beberapa jenis dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pajak, DBH untuk sumber daya alam dan DBH untuk cukai.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (11) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2013, Menteri Keuangan pada tanggal 2 september 2013 menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2) Tahun Anggaran 2017.

Pada dasarnya DP2D2 merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi berdasarkan hasil verifikasi keluaran Dana Alokasi Khusus yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun daerah percontohan DP2D2 yang berhak menerima alokasi DP2D2 Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil verifikasi BPKP berjumlah 71 daerah yang terdapat di berbagai wilayah termasuk Provinsi Sulawesi Selatan dan daerah yang dimaksud ada juga di Kabupaten Enrekang. Tujuan penggunaan DP2D2 ini adalah untuk mendukung kegiatan di bidang infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, dan infrastruktur air minum.

DP2D2 Tahun Anggaran 2017 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika Pemda telah menetapkan Peraturan Daerah mengenai APBD Perubahan atau tidak melakukan perubahan APBD, maka penerimaan DP2D2 dimaksud pada akhir tahun dicatat dalam Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017.

Untuk mengetahui penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang terkhusus Dinas Pekerjaan Umum. Kegiatan proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang selama Tahun 2017 terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

- a. Proyek pembangunan fisik yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana serta rehabilitasi sarana dan prasarana tersebut. Pada proyek pembangunan fisik ini, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang

menganggarkan nilai sebesar Rp 120.504.874.641, dan realisasinya sebesar Rp 113.393.293.025, yang terdiri dari beberapa kegiatan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3

Dana Proyek Pembangunan Fisik Dnas Pekerjaan Umum

No	Nama Proyek	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Dana
1	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	26.429.994.057	20.617.709.674	5.812.284.383
2	Program Pembangunan Saluran Drainase Dan Gorong-Gorong	3,652,967,000	3,332,130,000	320,837,000
3	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	189,688,493,424	158,816,320,167	30,872,173,257
4	Program Pengembangan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	37,412,716,139	30.407.328.042	7,005,388,097

5	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya	1,266,179,100	1,228,911,528	37,267,572
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	12,226,885,601	9,501,354,614	2,725,530,987
7	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1,678,196,885	1,515,979,922	162,216,963
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas Umum	12,011,157,265	6,886,998,465	5,124,158,800
9	Program Pengembangan Perumahan	14,535,667,485	13,827,551,218	708,116,267

Uraian kegiatan dana proyek pembangunan fisik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekanga adalah :

a. program pembangunan jalan dan jembatan terealisasi sebesar Rp20.617.709.674,- atau sebesar 78,01% dari total dana sebesar Rp26.429.994.057,- sehingga masih tersisa dana sebesar Rp5.812.284.383,-.Realisasi anggaran program pembangunan jalan dan jembatan untuk 2 (Dua) kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pembangunan Jalan, , realisasinya 5,461,134,074 atau sebesar 75.89% dari total dana anggarannya 7,196,544,457, sehingga masih tersisa dana sebesar 1,735,410,383.
- 2) Kegiatan Pembangunan Jembatan, , realisasinya 15,156,575,600 atau sebesar 78.80% dari total dana anggarannya 19,233,449,600, sehingga masih tersisa dana sebesar 4,076,874,000

b. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong terealisasi sebesar Rp 3,332,130,000,- atau sebesar 91.22 % dari total dana sebesar Rp 3,652,967,000,- sehingga masih tersisa dana sebesar Rp 320,837,000,-

c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan terealisasi sebesar Rp 158,816,320,167,- atau sebesar 83.72 % dari total dana sebesar Rp189,688,493,424,- sehingga masih tersisa dana sebesar Rp30,872,173,257,-.Realisasi anggaran program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan untuk 2 (Dua) kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Peningkatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, realisasinya 155,917,058,867atau sebesar 83.52 % dari total dana anggarannya 186,688,493,424, sehingga masih tersisa dana sebesar 30,771,434,557,-

- 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, realisasinya 2,899,261,300 sebesar 96.64 % dari total dana anggarannya 3,000,000,000, sehingga masih tersisa dana sebesar 100,738,700,-
- d. Program Pengembangan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya terrealisasi sebesar Rp 30,407,328,042,- atau sebesar 81.28 % dari total dana sebesar Rp 37,412,716,139,- sehingga masih tersisa dana sebesar Rp 7,005,388,097,-. Realisasi anggaran program Program Pengembangan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya untuk 6 (Enam) kegiatan adalah sebagai berikut:
- 1) Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi, realisasinya 1,490,207,594 atau sebesar 92.04 % dari total dana anggarannya 1,619,003,750, sehingga masih tersisa dana sebesar 128,796,156,-
 - 2) Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pendamping WISMP), realisasinya 371,904,416 atau sebesar 92.56 % dari total dana anggarannya 401,783,530, sehingga masih tersisa dana sebesar 29,879,114,-
 - 3) Kegiatan Pembangunan/Rehab/Pemel. Jaringan Irigasi, realisasinya 327,182,500 atau sebesar 83.57 % dari total dana anggarannya 391,490,500, sehingga masih tersisa dana sebesar 64,308,000,-
 - 4) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP-2), realisasinya 856,786,827 atau sebesar 80.48 % dari total dana anggarannya 1,064,530,000, sehingga masih tersisa dana sebesar 207,743,173,-
 - 5) Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK), realisasinya 27,361,246,705,- atau sebesar 80.95 % dari total dana

anggarannya 33,799,086,499,- sehingga masih tersisa dana sebesar 6,437,839,794,-

- 6) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, realisasinya 0,- atau sebesar 0 % dari total dana anggarannya 136,821,860, sehingga masih tersisa dana sebesar 136,821,860,-
- e. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya, realisasinya 1,228,911,528,- atau sebesar 97.06% dari total dana anggarannya 1,266,179,100, sehingga masih tersisa dana sebesar 37,267,572,-
- f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah terealisasi sebesar Rp 9,501,354,614,- atau sebesar 77.71 % dari total dana sebesar Rp 12,226,885,601,- sehingga masih tersisa dana sebesar Rp2,725,530,987,-.Realisasi anggaran program Program Pengembangan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya untuk 5 (Lima) kegiatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Sarana & Prasarana air Minum Bagi Masyarakat Pedesaan, realisasinya 4,886,611,658,- atau sebesar 86.09 % dari total dana anggarannya 5,676,174,000, sehingga masih tersisa dana sebesar Rp 789,562,342,-
 - 2) Kegiatan Penyediaan Sarana & Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Ibukota Kecamatan, realisasinya 2,160,791,350,- atau sebesar 58.94% dari total dana anggarannya 3,666,197,850, sehingga masih tersisa dana sebesar Rp 1,505,406,500,-
 - 3) Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM), realisasinya 2,322,137,379,- atau sebesar 85.41% dari total dana

anggarannya 2,718,740,324, sehingga masih tersisa dana sebesar Rp396,602,945,-

- 4) Kegiatan Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman, realisasinya 40,967,412,- atau sebesar 99.29% dari total dana anggarannya 41,258,612, sehingga masih tersisa dana sebesar 291,200,-
 - 5) Kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS), realisasinya 90,846,815,- atau sebesar 72.96% dari total dana anggarannya 124,514,815, sehingga masih tersisa dana sebesar 33,668,000,-
- g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh terealisasi sebesar Rp. 1,515,979,922,- atau sebesar 90% dari total dana sebesar Rp 1,678,196,885,- sehingga masih tersisa dana sebesar Rp 162,216,963,- .Realisasi anggaran program Program Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh untuk 3 (Tiga) kegiatan adalah sebagai berikut:
- 1) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Pedesaan dan Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), realisasinya 229,514,848,- atau sebesar 79.43% dari total dana anggarannya 288,943,900, sehingga masih tersisa dana sebesar 59,429,052,-
 - 2) Kegiatan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PIP) , realisasinya 69,375,450,- atau sebesar 40.32% dari total dana anggarannya 172,054,950, sehingga masih tersisa dana sebesar 102,679,500,-
 - 3) Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan TMMD , realisasinya 1,217,089,624,- atau sebesar 99.99% dari total dana anggarannya 1,217,198,035, sehingga masih tersisa dana sebesar 108,411,-

- h. Program Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas Umum terealisasi sebesar Rp. 6,886,998,465,- atau sebesar 57.34% dari total dana sebesar Rp. 12,011,157,265,- sehingga masih tersisa dana sebesar Rp5,124,158,800,-.
- i. Program Pengembangan Perumahan terealisasi sebesar Rp13,827,551,218,- atau sebesar 95% dari total dana sebesar Rp14,535,667,485,- sehingga masih tersisa dana sebesar Rp 708,116,267. Realisasi anggaran program Pengembangan Perumahan untuk 2 (dua) kegiatan adalah sebagai berikut:
- 1). Kegiatan Penataan/Pengembangan Lingk. Perumahan (Jalan Lingkungan), realisasinya sebesar 13,692,272,453,- atau 96.15 dari total dana 14,239,929,720,- sehingga masih tersisa 547,657,267
 - 2). Kegiatan Penyedia Rumah Swadaya, realisasinya sebesar 135,278,765,- atau 45.74 dari total dana 295,737,765,- sehingga masih tersisa 160,459,000,-

Tabel 4.4

Dana Proyek Pembangunan Non Fisik Dinas ke PU-an

No	Nama Proyek	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	Persen(%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.138.944.150	2.266.639.671	872.304.479	72,21
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	1.196.590.000	1.020.137.000	176.453.000	82,25

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	485.000.000	482.953.113	2.046.887	99,58
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	37.000.000	37.000.000	-	100,00
5	Program Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran SKPD	38.000.000	38.000.000	-	100,00
6	Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Pekerjaan Umum	530.502.640	528.759.140	1.743.500	99,67
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	2.986.331.000	2.788.024.352	198.306.648	93,35
8	Program Pelayanan Jasa Pengujian Kualitas Konstruksi	229.927.296	221.262.796	8.664.500	96,23
9	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Laboratorium Pengujian	116.286.046	113.244.446	3.041.600	97,38
10	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	434.427.500	428.986.786	5.440.714	98,74

11	Program Pembinaan Dan Pengawasan Perencanaan Teknis Pekerjaan Umum	135.492.000	130.992.000	4.500.000	96,68
12	Program Perencanaan Tata Ruang	860.557.123	822.539.217	37.817.906	95,58
13	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	289.999.809	289.119.805	880.000	99,69
14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	235.000.000	234.400.000	600.000	99,74

Uraian dari kegiatan proyek pembangunan non fisik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2017 adalah :

- a. Pelayanan adminitrasi perkantoran, dengan jumlah anggaran sebesar Rp3.138.944.150,- Realisasi sebesar Rp 2.266.639.671,- atau 72,97% dengan sisa dana 872.304.479 yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 100.000.000,- Realisasi Rp82.590.572,- atau 82,59% dengan sisa dana sebesar Rp 17.409.428.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 5.734.000,- Realisasi sebesar Rp2.734.00,- atau 47,68% dengan sisa dana sebesar Rp3.000.000

- 3) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 18.900.000,- Realisasi sebesar Rp 16.440.000,- atau 86,98% dengan sisa dana sebesar Rp2.460.000.
 - 4) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Keluar Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 400.000.000,- Realisasi sebesar Rp399.714.949,- atau 99,93% dengan sisa dana sebesar Rp 285.051.
 - 5) Kegiatan Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang dan Jasa, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.125.000.000,- Realisasi sebesar Rp 472.750.000,- atau 42,02% dengan sisa dana sebesar Rp652.250.000.
 - 6) Kegiatan KoorDinasi, Konsolidasi Dalam Daerah & Peninjauan Lapangan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 130.000.000,- Realisasi sebesar Rp 130.000.000,- atau 100% dengan sisa dana sebesar -.
 - 7) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan & Perkantoran, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.354.310.150,- Realisasi sebesar Rp1.157.410.150,- atau 85,46% dengan sisa dana sebesar Rp196.900.000.
 - 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Dapur Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 5.000.000,- Realisasi sebesar Rp 5.000.000,- atau 100% dengan sisa dana sebesar -.
- b. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.196.590.000,- realisasi sebesar Rp 1.020.137.000,-

atau 82,25% dengan sisa dana sebesar Rp 176.453.000, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan antara lain :

- 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 699.250.000,- Realisasi sebesar Rp666.225.700,- atau 95,28% dengan sisa dana sebesar Rp 33.024.300.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 189.040.000,- Realisasi sebesar Rp 64.000.000,- atau 33,86% dengan sisa dana sebesar Rp 125.040.000.
 - 3) Kegiatan Pengadaan Mebeleur, dengan jumlah anggaran sebesar Rp199.900.000,- Realisasi sebesar Rp 189.161.900,- atau 94,63% dengan sisa dana sebesar Rp 10.738.100.
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 25.000.000,- Realisasi sebesar Rp 24.717.000,- atau 98,87% dengan sisa dana sebesar Rp 283.000
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 65.050.000,- Realisasi sebesar Rp60.532.400,- atau 93,06% dengan sisa dana sebesar Rp 4.517.600.
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 18.350.000,- Realisasi sebesar Rp15.500.000,- atau 84,47% dengan sisa dana sebesar Rp 2.850.000.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 485.000.000,- realisasi sebesar Rp 482.953.113,- atau 99.58% dengan sisa dana sebesar Rp 2.046.887. Yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS dengan

jumlah anggaran sebesar Rp 485.000.000,- realisasi sebesar Rp482.953.113,- atau 99,58% dengan sisa dana sebesar Rp 2.046.887.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 37.000.00,- realisasi sebesar Rp 37.000.000,- atau 100%. Yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan antara lain yaitu :

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Catatan Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 11.000.000,- Realisasi sebesar Rp 11.000.000,- atau 100% dengan sisa dana sebesar –

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 15.000.000,- Realisasi sebesar Rp15.000.000,- atau 100% dengan sisa dana sebesar –

3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 11.000.000,- Realisasi sebesar Rp11.000.000,- atau 100% dengan sisa dana sebesar –

e. Program Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran SKPD , dengan jumlah anggaran sebesar Rp 38.000.000,- realisasi sebesar Rp 38.000.000,- atau dengan 100%. Yang terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan antara lain yaitu :

1) Kegiatan Penyusunan RKA – SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 12.000.000,- Realisasi sebesar Rp 12.000.000,- atau 100% dengan sisa dana sebesar –

2) Kegiatan Penyusunan DPA – SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 11.000.000,- Realisasi sebesar Rp 11.000.000,- atau 100% dengan sisa dana sebesar –

- 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 15.000.000,- Realisasi sebesar Rp 15.000.000,- atau 100% dengan sisa dana sebesar –
- f. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Pekerjaan Umum, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 530.502.640,- realisasi sebesar Rp528.759.140,- atau 99,67% dengan sisa dana sebesar Rp 1.743.500. yang terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan antara lain yaitu :
- 1) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/database irigasi/Sungai, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 119.210.000,- Realisasi sebesar Rp118.903.500,- atau 99,74% dengan sisa dana sebesar Rp 306.500.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/database Bina Marga, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 126.105.000,- Realisasi sebesar Rp125.830.000,- atau 99,78% dengan sisa dana sebesar Rp 275.000.
 - 3) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/database Keciaptakaryaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 285.187.640,- Realisasi sebesar Rp 284.025.640,- atau 99,59% dengan sisa dana sebesar Rp 1.162.000.
- g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.986.331.000,- realisasi sebesar 2.788.024.352,- atau 93,35% dengan sisa dana sebesar Rp 198.306.648. yang terdiri dari 4 (Empat) kegiatan antara lain yaitu :
- 1) Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.410.843.000,- Realisasi sebesar Rp 2.223.343.300,- atau 92,22% dengan sisa dana sebesar Rp 187.499.700.

- 2) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat, sebesar Rp399.032.500,- Realisasi sebesar Rp 388.818.132,- atau 97,44% dengan sisa dana sebesar Rp 10.214.368.
 - 3) Kegiatan Monitoring/Pengawasan Alat Berat Dan Alat Angkut ,sebesar Rp 36.322.000,- Realisasi sebesar Rp 36.262.000,- atau 99,83% dengan sisa dana sebesar Rp 60.000.
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel, sebesar Rp 140.133.500,- Realisasi sebesar Rp 139.600.920,- atau 99,62% dengan sisa dana sebesar Rp 532.580.
- h. Program Pelayanan Jasa Pengujian Kualitas Konstruksi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 229.927.296,- realisasi sebesar Rp 221.262.796,- atau 96,23% dengan sisa dana sebesar Rp 8.664.500. Yang terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Mutu dan Evaluasi Bangunan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 220.927.296,- realisasi sebesar Rp221.262.796,- atau 96,23% dengan sisa dana sebesar Rp 8.664.500.
- i. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Laboratorium Pengujian, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 116.286.046,- realisasi sebesar Rp113.244.446,- atau 97,38% dengan sisa dana sebesar Rp 3.041.600. Yang terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Laboratorium, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 116.286.046,- realisasi sebesar Rp 113.244.446,- atau 97,38% dengan sisa dana sebesar Rp3.041.600.
- j. Program Pembinaan Jasa Konstruksi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp434.427.500,- realisasi sebesar Rp 428.986.786,- atau 98,74% dengan sisa dana sebesar Rp 5.440.714. Yang terdiri dari 2 (Dua) kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Ke PU-an, sebesar Rp169.427.500,- Realisasi sebesar Rp 169.427.500,- atau 100% dengan sisa dana sebesar –
 - 2) Bimbingan Teknis Pengendalian Mutu Dan Penyelenggaraan Sarana & Prasarana ke PU-an, sebesar Rp 265.000.000,- Realisasi sebesar Rp259.559.286,- atau 97,95% dengan sisa dana sebesar Rp 5.440.714.
- k. Program Pembinaan Dan Pengawasan Perencanaan Teknis Pekerjaan Umum, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 135.492.000,- realisasi sebesar Rp 130.992.000,- atau 96,68% dengan sisa dana sebesar Rp 4.500.000. Yang terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Gambar Rencana Kerja dan Syarat Teknis Perencanaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 135.492.000,- realisasi sebesar Rp 130.992.000,- atau 96,68% dengan sisa dana sebesar Rp 4.500.000.
- l. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 860.557.123,- realisasi sebesar 822.539.217,- atau 95,58% dengan sisa dana sebesar Rp 37.817.906. yang terdiri dari 4 (Empat) kegiatan antara lain yaitu :
1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) & Peraturan Zonasi (PZ) Kota Alla, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 290.000.000,- realisasi sebesar Rp 282.297.140,- atau 97,34% dengan sisa dana sebesar Rp 7.702.860.
 2. Legislasi/Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Enrekang, Kota Maiwa & Kota Anggeraja, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 77.351.492,- realisasi sebesar Rp 69.025.492,- atau 89,24% dengan sisa dana sebesar Rp 8.326.000.

3. Peninjauan Kembali Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Enrekang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 293.017.280,- realisasi sebesar Rp 280.816.934,- atau 95,84% dengan sisa dana sebesar Rp 12.200.546.
 4. Lanjutan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dengan jumlah anggaran sebesar Rp 199.988.151,- realisasi sebesar Rp 190.399.651,- atau 95,21% dengan sisa dana sebesar Rp 9.588.500.
- m. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 289.999.809,- realisasi sebesar 289.119.805,- atau 99,69% dengan sisa dana sebesar Rp 880.000. yang terdiri dari 2 (Duat) kegiatan antara lain yaitu :
1. Kegiatan Pengawasan Bangunan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 189.999.805,- realisasi sebesar Rp 189.999.805,- atau 100% dengan sisa dana sebesar -
 2. Kegiatan Pembuatan Papan Billboard Peta Dasar, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 100.000.000,- realisasi sebesar Rp 99.120.000,- atau 99,12% dengan sisa dana sebesar Rp 880.000.
- n. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 235.000.000,- realisasi sebesar 234.4000.000,- atau 99,74% dengan sisa dana sebesar Rp 600.000. yang terdiri dari 1 (Satu) kegiatan antara lain yaitu : Kegiatan Penyempurnaan Rencana Program Investasi Jangka Menengah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 235.000.000,- realisasi sebesar 234.4000.000,- atau 99,74% dengan sisa dana sebesar Rp 600.000.

Penerapan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja perencanaan pembangunan, yang dibarengi adanya penilaian atau evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyusunan program/kegiatan pada tahun yang akan datang, hal ini dimaksudkan agar dapat menunjang pengendalian dan untuk memperkecil ketidakefisienan program perencanaan di Bappeda.

Berdasarkan hasil evaluasi dari upaya-upaya pelaksanaan program/kegiatan urusan perencanaan di Kabupaten Enrekang, maka pada tahun 2017 diraih beberapa hasil antara lain :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya dokumen perencanaan tahunan yang ada baik dalam lingkup Bappeda maupun lingkup SKPD lainnya yang dapat berfungsi sebagai penunjang dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk tahun-tahun berikutnya.
2. Terselenggaranya berbagai kegiatan pelatihan, lokakarya, workshop dan bimbingan teknik tentang perencanaan pembangunan daerah yang diharapkan berdampak pada meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparat perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
3. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi terhadap semua program/kegiatan pembangunan baik yang bersumber dari APBN, APBD provinsi maupun APBD Kabupaten.
4. Terjalinnnya hubungan interkoneksi dengan stakeholders internal dan eksternal Pemerintah Kabupaten Enrekang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai pelaporan dana dan pemeriksaan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang pada tahun anggaran 2017 berupa laporan realisasi anggaran dan neraca yang telah diaudit oleh Inspektorat dan BPK
2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang mencatat anggaran atau pengelolaan dananya pada tahun 2017 yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
3. Pada tahun anggaran 2017 , pemerintah Kabupaten Enrekang termasuk Dinas Pekerjaan Umum didalam menyajikan laporan keuangan daerah telah berpedoman pada standar Akuntansi Pemerinthang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2005
4. Di dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang masih menggunakan bantuan tenaga konsultan dan pendamping dari Inspektorat dan BPK. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sumberdaya manusia atau pegawai masih rendah dalam menjalan kandang mengoperasikan aplikasi system akuntan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan sendiri. Salah satu penyebabnya karena keterbatasan perangkat pendukung atau infrastruktur berupa computer dan software.

5. Audit intrn cukup berperan untuk menunjange fektifitas pengelolaan dana proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang dimana telah tercapai beberapa kinerja kegiatan pada tahun 2017.

B. SARAN - SARAN

Beberapa hal yang diusulkan penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk tahun aggaran berikutnya hendaknya Dinas Pekerjaan Umum dalam pengelolaan keuangan daerah telah berpedoman sepenuhnya kepada peraturan-peraturan yang ada, agar pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar efektif dapat terwujud dan laporan keuangan yang disajikan dapat berguna bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.
2. Perlu melakukan penelitian yang lebih, untuk mengetahui seberapa efektifnya peranan audit intern untuk menunjang efektifitas pengelolaan dana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Ahmad Tjahjono, & M. Fakhri Husein. 2009. Sistem Pengendalian Manajemen. Edisi Revisi Ketiga. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Pencetakan.
- American Accounting Association. 1996. A Statement Of Basic Accounting Theory: Committe to Prepare A Statement of Basic Accounting Theory, Illinois, USA.
- Board Director The Institute Of Internal Audit (1996). Redefinisi Terhadap Internal Auditing Dikutif Oleh Akmal (2006)
- Randal J. Elder, Mark S, Beasley, Alvin A, Arens dalam buku Amir Abadi Yusuf. 2011. Auditing, Jakarta.
- Badan Pengawasan Keuagandan Pembangunan (BPKP), 2008. "Kode Etik dan Standar Audit", Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Agustina, D. Eand Zaelani, R. 2017. pengaruh pemeriksaan internal (audit internal) terhadap efektivitas pengendalian internal. Jurnal ilmiah ilmu ekonomi. Issn: 20886969. Vol.5 Edisi 10.
- Effendi, Muh Arief. (2006). The Power Of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi. Penerbit Salemba Empat . Jakarta.
- Fitrik. 2005. "Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi". Skripsi Sarjana, Malang, Universitas Bramawijaya.
- Arief, L.F and Putra, I.S. 2016. peranan audit internal untuk menunjang efektivitas pengendalian internal persediaan obat-obatan pada rumah sakit umum Aminah Blitar. Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK). Issn: 2407-2680. Vol.3, No.1.
- Mulyadi. 2008. Auditing, Edisi Keenam (cetakan kedelapan) , Jakarta : Salemba Empat.
- Ralona, M. 2006, Kamus Istilah Ekonomi Populer, Jakarta : Gorga Media.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005. Budaya Organisasi, Rineka Cipta, jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sawyer, Lawrence B., Dittenhoffer, and Scheiner. (2005). *Audit Internal Sawyer's*. Jakarta : Salemba Empat.

Sharma, R.A., Gescher, A.J., Steward, W.P., 2005, Curcumin: The Story so Far, *Eur. J. Cancer*, 41, 1955-1968.

Sucipto. *Internal Auditing*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra, Diakses 25 Februari 2007. (<http://usu.digital.library.com/>)

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Merliana,Vina. 2017. pengaruh audit internal untuk mengeluarkan laporan audit terhadap penilaian integritas data penjualan pada perusahaan (studi kasus pada perusahaan PT Cipta Mulyadi Pratama, Jakarta). *Jurnal Indonesia Membangun*. Vol. 16. No.2

RINCIAN KERTAS KERJA TAHUN 2017

Nomor : 700.04/162/V/IRKAB/2017

Tanggal : 10 MEI 2017

Lampiran : -

no	pekerjaan	Perhitungan tahun 2017				
		pelaksana	Tanggal kotrak	Nomor kontrak	Nilai kontrak	realisasi
1	Pemasangan bronjong galung (desa tungka)	cv. harapan baru	20 oktober 2016	04/SPK/RPBTS/DPUK/X/2016	99.670.000	100%
2	Pemasangan bronjong londa (desa temban)	CV. Bumi persada	16 september 2016	1/SPK/RBTS/DPUK/IX/2016	99.500.000	100%
3	Pemasangan bronjong kampong pudukku	CV. Alfaim putra rakyndo	16 september 2016	03/SPK/PRBT/DPUK/IX/2016	99.500.000	100%
4	Pemasangan bronjong kabere	CV. Amalia daya konsultan	16 september 2016	02/SPK/RPBTS/DPUK/IX/2016	99.500.000	100%
5	Pemasangan IPAL komunal kec. Cendana (DAK)	KSM Sipatuju	25 agustus 2016	01/SWAK/SLBM/DPUK/VII/2016	332.329.000	100%
6	Pembangunan IPAL komunal kec. curio (DAK)			2/SWAK/SLBM/DPUK/III/2016 (akan diaudit oleh BPKP)		
7	Pemb. Toilet umum kel. Lakawan kec. anggeraja			Tidak diaudit oleh tim inspektorat Kab. Anggeraja karena telah dilakukan pemeriksaan		

				oleh TPAD Kab. Enrekang		
8	Pemb. Toilet Umum Kel. Kambiolangi Kec. Alla			Tidak diaudit oleh tim inspektorat Kab. Anggeraja karena telah dilakukan pemeriksaan oleh TPAD Kab. Enrekang		
9	Pembangunan MCK putri perkemahan pramuka	cv. salman	30 september 2016	01/SPK/SLBM/DPUK/IX /2016	185.700.000	100%
10	Pembangunan MCK putra perkemahan pramuka	cv. hermayana	30 september 2016	02/SPK/SLBM/DPUK/IX /2016	185.700.000	100%